

**KEBIJAKAN REGULASI PERGURUAN TINGGI VOKASI
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
(STUDI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN
TINGGI)**

Gandhi Bhima Parmukti

Abstrak

Pendidikan vokasi saat ini menempati posisi strategis dalam upaya mendukung penciptaan sumber daya manusia yang produktif. Hal ini dipandang dari kekhasannya dalam pembelajaran yang memberikan porsi praktik yang lebih besar dibanding teori, sehingga lulusannya harus berkompeten dan siap untuk bekerja. Di masa datang bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah krusial, salah satunya adalah pertambahan penduduk yang memberikan dampak negatif jika tidak dipersiapkan strateginya. Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah revitalisasi pendidikan vokasi untuk lebih memperkuat satuan pendidikan vokasi dalam menyiapkan lulusannya. Politeknik sebagai salah satu perguruan tinggi yang murni menyelenggarakan pendidikan vokasi diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Namun seiring dengan beban besar yang ditanggung, terdapat satu hambatan yang terletak pada pengaturan kelembagaan pada materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. Materi muatan tersebut terletak pada pengaturan organisasi yang telah mengunci politeknik untuk mengembangkan dirinya. Padahal hierarki norma di atasnya membuka ruang bagi politeknik untuk dapat berkembang seiring dengan tuntutan penyiapan SDM.

Kata Kunci : pertambahan penduduk, penyiapan generasi, perguruan tinggi vokasi

**REGULATION POLICIES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS IN A LEGAL
POLITICAL PERSPECTIVE**
**(STUDY OF REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
NUMBER 139 OF 2014 CONCERNING HIGHER EDUCATION STATUTES AND
ORGANIZATION GUIDELINES)**

Gandhi Bhima Parmukti

Abstract

Vocational education currently occupies a strategic position in efforts to support the creation of productive human resources. This is seen from its uniqueness in learning which provides a larger portion of practice than theory, so graduates must be competent and ready to work. In the future, the Indonesian nation will be faced with various crucial problems, one of which is population growth which will have a negative impact if the strategy is not prepared. One of the steps taken by the government is the revitalization of vocational education to further strengthen vocational education units in preparing their graduates. Polytechnic as one of the tertiary institutions which purely organizes vocational education is expected to be able to answer this challenge. However, along with the large burden that is borne, there is one obstacle that lies in the institutional arrangement of the content contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 139 of 2014 concerning Guidelines for Higher Education Statutes and Organizations. The content material lies in organizational arrangements that have locked the polytechnic to develop itself. Even though the hierarchy of norms above it opens space for polytechnics to be able to develop in line with the demands of preparing human resources.

Keywords: population growth, generation preparation, vocational colleges